

2019

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG

JL. ANAS KARIM NO. 14 PADANG PANJANG | TELP. (0752) 83487 FAX. (0752) 485281

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna adalah pembangunan yang dilakukan dengan didasari sebuah perencanaan yang teknokratik, komprehensif dan terukur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana, Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Keempat tahap tersebut merupakan tahapan yang mutlak dilaksanakan dalam proses pembangunan. Di samping itu, penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang harus berpedoman pada strategi dan kebijakan yang tepat, sehingga visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan terwujud.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di samping memperhatikan hasil perencanaan daerah berjenjang (Musrenbag Kelurahan, Kecamatan dan Kota).

Maka dari itu, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan lembaga teknis operasional dan sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat daerah, perlu membuat Rencana Kerja SKPD, supaya kegiatan yang ada dapat terarah dan tersusun sesuai dengan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Secara legalitas formal, penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 ini didasarkan antara lain kepada :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif Terhadap Wanita (CEDAW);

4. Undang Undang Nomor 68 tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Keuangan Negara.
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara.
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008.
15. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
16. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
19. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
20. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
21. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Menyusun Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Perspektif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RENSTRA SKPD dan RENJA SKPD.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yaitu sebagai pedoman dan acuan dalam merencanakan penyusunan RKA OPD yang memuat program dan kegiatan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya prioritas Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam turut mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah kedalam rencana kegiatan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang KB Kota Padang Panjang disusun dengan sistematika berikut ini :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini merupakan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KOTA PADANG PANJANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan n-2 (2017)			Target Program dan Kegiatan n-1 (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Catatan Analisis
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	URUSAN SOSIAL										
15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
06	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	PRSE yang dilatih	250 orang	70 orang	80 orang	80 orang	100%	50 orang	250 orang	100%	
10	Pembinaan KUBE FM Perkotaan	KUBE yang dibina	197 KUBE	100 KUBE	65 KUBE	65 KUBE	100%	32 KUBE	197 KUBE	100%	
16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Anggota TAGANA yang dibina	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	100%	25 orang	25 orang	100%	
18	Pendampingan asistensi sosial lanjut usia	Aslut dan orang cacat berat yang dibina	90 Lansia 10 org cacat	90 Lansia 10 org cacat	90 Lansia 10 org cacat	90 Lansia 10 org cacat	100%	90 Lansia 10 org cacat	90 Lansia 10 org cacat	100%	
19	Operasional LK3	Jumlah LK3 yang dibina	1 LK3	1 LK3	1 LK3	1 LK3	100%	1 LK3	1 LK3	100%	
21	Pendampingan pelaksanaan program keluarga harapan	Jumlah calon penerima bantuan yang di beri sosialisasi	1204 PKH	804 PKH	300 PKH	300 PKH	100%	100 PKH	100 PKH	100%	
17	Program pembinaan anak terlantar										
07	Rumah Singgah	Operasional Rumah Singgah	1 Rumah Singgah	1 Rumah Singgah	1 Rumah Singgah	1 Rumah Singgah	100%	1 Rumah Singgah	1 Rumah Singgah	100%	
20	Program pembinaan penyandang										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan n-2 (2017)			Target Program dan Kegiatan n-1 (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Catatan Analisis
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)									
21		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial									
	19	Peningkatan pemberdayaan pengurus panti, organisasi sosial dan karang taruna	Jumlah karang taruna yang dibina	16 Karang taruna	16 Karang taruna	16 Karang taruna	16 Karang taruna	100%	16 Karang taruna	16 Karang taruna	100%
	20	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	PSM yang diberdayakan TKSK yang diberdayakan PSM & TKSK yg dilatih	93 org 2 org 95 orang	93 org 2 org 95 orang	93 org 2 org 95 orang	93 org 2 org 95 orang	100%	93 org 2 org 95 orang	93 org 2 org 95 orang	100%
	21	Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Peserta Sarasehan Bantuan Uang saku veteran sosial	60 orang 40 orang	60 orang 40 orang	60 orang 40 orang	60 orang 40 orang	100%	60 orang 40 orang	60 orang 40 orang	100%
	26	Operasional lembaga koordinasi kesejahteraan sosial	Paket lebaran bagi KK miskin Operasional LKKS	250 paket 1 tahun	250 paket 1 tahun	250 paket 1 tahun	250 paket 1 tahun	100%	250 paket 1 tahun	250 paket 1 tahun	100%
	29	Pemutakhiran dan penyusunan database PMKS dan PSKS	Sistem informasi PMKS dan kemiskinan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan									
	06	Capacity building forda	Perwakilan anak yang mengikuti capacity building Forda	275 orang	125 orang	100 orang	100 orang	100%	50 orang	50 orang	100%
16		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak									
	01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Peserta advokasi dan fasilitasi PUG	115 orang	60 orang	55 orang	55 orang	100%	-	-	100%
	02	Pelaksanaan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan perempuan dan anak	500 orang	300 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan n-2 (2017)			Target Program dan Kegiatan n-1 (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Catatan Analisis
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	(P2TP2)										
04	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesejahteraan dan keadilan gender (KKG)	Peserta seminar	300 orang	200 orang	-	-	-	100 orang	100 orang	100%	
08	Pengembangan informasi gender dan anak	Buku statistik gender yang tersedia	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100%	1 buku	1 buku	100%	
11	Pelaksanaan pengembangan kota layak anak	Peserta pelatihan	279 orang	100 orang	125 orang	125 orang	100%	54 orang	54 orang	100%	
18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan										
09	Pembinaan organisasi perempuan melalui GOW	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	34 organisasi	34 organisasi	34 organisasi	34 organisasi	100%	-	-	-	
10	Pembinaan organisasi perempuan melalui Dharmawanita Persatuan	Program DWP yang dilaksanakan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	-	-	-	
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA											
15	Program Keluarga Berencana										
02	Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan konseling program KB/KS	Hasil Pendataan Keluarga	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	100%	
05	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Kader yang dibina	680 orang	680 orang	680 orang	680 orang	100%	680 orang	680 orang	100%	
24	DAK Bidang keluarga Berencana	Sarana penunjang KB	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
27	Dana Penunjang DAK Bidang Keluarga Berencana	Sarana penunjang KB	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
16	Program kesehatan reproduksi remaja										
01	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	Jumlah Peserta pelatihan PKBR	627 orang	277 orang	250 orang	250 orang	100%	100 orang	100 orang	100%	
03	Pemilihan duta mahasiswa dan remaja GenRe	Peserta yang mengikuti pemilihan duta Genre	500 orang	300 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%	
04	Ajang temu kreatifitas PIK Remaja melalui Jambore Saka Kencana	Peserta Jambore PIK Remaja	550 orang	350 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan n-2 (2017)			Target Program dan Kegiatan n-1 (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Catatan Analisis
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
17		Program pelayanan kontrasepsi									
	02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Peserta Sosialisasi Bhakti IBI dan TNI KB Kes	550 orang	350 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri									
	04	Pemantapan ketahanan keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang dibina	80 kelompok	80 kelompok	80 kelompok	80 kelompok	100%	80 kelompok	80 kelompok	100%
	05	Penggerakan kemitraan dalam mengelola kependudukan dan keluarga berencana (KKB)	Peserta Sosialisasi	500 orang	300 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
	06	DAK Belanja operasional KB	Sarana penunjang KB	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD.

Keberhasilan kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%		80%	80%	80%	80%	36,95	84,10	80%	80%	
2.	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	80%		80%	80%	80%	80%	33,42	80	85%	85%	
3.	Persentase panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%		80%	80%	80%	80%	80	80	80%	80%	
4.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%		60%	60%	60%	60%	80	80	60%	60%	
5.	Persentase korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%		80%	80%	80%	80%	-	100	80%	80%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
6.	Persentase korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%		80%	80%	80%	80%	-	-	80%	80%	
7.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%		40%	40%	40%	40%	17,36	20,92	40%	40%	

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang pada tahun 2017 rata-rata dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun terdapat satu indikator yang pencapaiannya dibawah 100% yaitu persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk jaminan sosial penyandang cacat dan mental serta lanjut usia tidak potensial merupakan anggaran dari kementerian Sosial Republik Indonesia. Anggaran untuk Kota Padang Panjang hanya tersedia untuk 100 orang penyandang cacat dan mental serta lanjut usia tidak potensial. Untuk masa yang akan datang akan diupayakan penyediaannya untuk seluruh penyandang cacat dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang membutuhkan melalui anggaran APBD dan APBN.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Belum terintegrasinya penanganan kemiskinan di Kota Padang Panjang
2. Sikap mental masyarakat yang belum mau keluar dari daftar masyarakat miskin.
3. Masih kurang optimalnya peran masyarakat dan swasta dalam penanganan PMKS.
4. Masih belum optimalnya penanganan terhadap PMKS.
5. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan
6. Belum optimalnya kelembagaan PUG
7. Masih rendahnya ketahanan keluarga
8. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak
9. Kecenderungan penurunan peran serta masyarakat dalam pembangunan
10. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masih perlu dioptimalkan
11. Masih perlu dioptimalkannya koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat
12. Masih tingginya unmetneed
13. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi

14. Belum tersedianya grand design pembangunan kependudukan (GDPK)

15. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatas, dapat disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Pelayanan rehabilitasi sosial dengan fokus pada jenis panti dan LKS yang sesuai dengan permasalahan yang ada di daerah dan meningkatkan kesejahteraan perempuan rawan sosial.
2. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Penyediaan stok bantuan bencana dan penanganan trauma healing.
4. Penyediaan rancangan induk pengendalian penduduk.
5. Pelayanan KB gratis bagi pasangan usia subur yang belum ber-KB.

6. Pelayanan KB MOP.
7. Memberdayakan ekonomi keluarga peserta KB.
8. Meningkatnya tahapan kelompok ketahanan keluarga.
9. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan PPRG dan pelaksanaan pelatihan usaha dan pendampingan kepada perempuan, dikhususkan pada perempuan kepala keluarga rawan ekonomi.
10. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan.
11. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA.
12. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dina Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah dirumuskan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun	
			2018	2019
Meningkatkan kesertaan pasangan usia subur untuk ber-KB	Meningkatnya jumlah akseptor KB baru dan terbinanya peserta KB Aktif	Cakupan PUS ber-KB	2,7	2,5
	Meningkatnya jumlah akseptor KB pria	Cakupan KB pria	17,98	18,50%
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	800%	80%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam BBGRM	Persentase nilai swadaya masyarakat dalam BBGRM	530%	100%
Angka partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam parlemen	Persentase perempuan di parlemen	25%	25%
	Sumbangan pendapatan perempuan dalam pendapatan kerja	Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam pendapatan kerja	46,60%	48,50%
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan	Ratio perempuan korban kekerasan	0,03	0,03

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun	
			2018	2019
	perempuan korban kekerasan			
	Proporsi perempuan sebagai tenaga manajer profesional, administrasi, teknisi	Persentase perempuan sebagai tenaga manajer profesional, administrasi, teknisi	67,17%	70%
Terwujudnya Kota Layak Anak	Meningkatnya implementasi Kota Layak Anak	Skor capaian Kota Layak Anak	722	750

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Sosial pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang direncanakan untuk Periode Tahun 2019 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Lampiran 3.2**.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2019.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

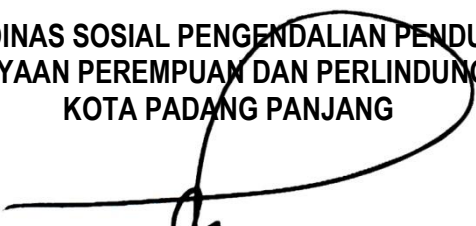
Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Perangkat Daerah maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tahun 2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah.

Padang Panjang, September 2018

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**


MARTONI, S. Sos, M. Si
Pembina Tk. I, NIP. 19730304 199308 1 001

LAMPIRAN III.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG

PRIORITAS PERTAMA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Lancarnya kegiatan perkantoran	Dinas Sosial PPKBP3A	1 tahun	1.862.310.000			1 tahun	1.954.100.000
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan surat yang dilayani	Dinas Sosial PPKBP3A	400 lbr materai 3000, 400 lbr materai 6000, paket/pengiriman	3.450.000	APBD		400 lbr materai 3000, 400 lbr materai 6000, paket/pengiriman	4.100.000
02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang digunakan dalam setahun	Dinas Sosial PPKBP3A	5 rek telp, 6 rek air, 6 rek listrik	87.500.000	APBD		5 rek telp, 6 rek air, 6 rek listrik	87.500.000
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah sopir dan jumlah kendaraan yang dapat dioperasikan per tahun	Dinas Sosial PPKBP3A	9 orang sopir, 12 unit kend roda 4, 1 unit kend roda 6, 30 unit kend roda 2	687.600.000	APBD		9 orang sopir, 12 unit kend roda 4, 1 unit kend roda 6, 30 unit kend roda 2	690.000.000
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan yang tersedia	Dinas Sosial PPKBP3A	13 orang, 1 tahun	453.325.000	APBD		13 orang, 1 tahun	460.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Dinas Sosial PPKBP3A	30 jenis	35.000.000	APBD		1 tahun	45.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	Dinas Sosial PPKBP3A	1 tahun	38.000.000	APBD		1 tahun	45.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	Dinas Sosial PPKBP3A	1 tahun	3.000.000	APBD		1 tahun	4.500.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat yang tersedia	Dinas Sosial PPKBP3A	1 tahun	54.000.000	APBD		1 tahun	68.000.000
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	Dinas Sosial PPKBP3A	1 tahun	500.435.000	APBD		1 tahun	550.000.000
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	Dinas Sosial PPKBP3A	1 tahun	73.900.000	APBD		1 tahun	83.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Dinas Sosial PPKBP3A	6 unit	49.000.000	APBD		1 tahun	55.000.000
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Dinas Sosial PPKBP3A	1 tahun	24.900.000	APBD		1 tahun	28.000.000
05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya SDM aparatur	Dinas Sosial PPKBP3A	1 tahun	25.000.000	APBD		1 tahun	30.000.000
03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	Dinas Sosial PPKBP3A	6 orang	25.000.000	APBD		1 tahun	30.000.000
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	500.000	APBD		100%	500.000
01	Penyusunan laporan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	Dinas Sosial PPKBP3A	12 laporan	300.000	APBD		12 laporan	300.000
02	Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, Renja, LKJIP, LKPJ, LPPD, SPIP, Penetapan kinerja.	Dinas Sosial PPKBP3A	8 laporan	200.000	APBD		8 laporan	200.000
1.01.06	URUSAN SOSIAL								
15	Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Persentase penanganan keluarga miskin	Dinas sosial PPKBP3A	80%	370.000.000				701.831.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah kelompok KUBE yang dibina	Dinas sosial PPKBP3A	20 Kelompok	135.000.000	APBD		20 Kelompok	225.831.000
03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Jumlah e-warung yang dibina	Dinas sosial PPKBP3A	12 e-warung	40.000.000	APBD		12 e-warung	45.000.000
19	Operasional LK3	Jumlah tenaga pelayanan LK3	Dinas Sosial PPKBP3A	5 orang	95.000.000	APBD		5 orang	201.000.000
06	Penanganan fakir miskin	Jumlah BPNT yang disalurkan ke KPM	Dinas sosial PPKBP3A	200 KPM	100.000.000	APBD		12 bulan	230.000.000
16	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase penyandang disabilitas yang tertangani	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	827.000.000			100%	1.134.200.000
18	Pendampingan asistensi sosial lanjut usia dan asistensi orang kecacatan berat	Jumlah lansia dan orang dengan kecacatan berat yang dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	Lansia tidak produktif 92 orang dan	620.000.000	APBD		Lansia tidak produktif 92 orang dan	720.000.000
21	Pendampingan pelaksanaan program keluarga harapan	Jumlah keluarga harapan yang didampingi	Dinas Sosial PPKBP3A	700 kpm	47.000.000	APBD		125 orang	164.200.000
22	Pemberdayaan penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	20 orang	120.000.000	APBD		20 orang	150.000.000
05	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah perempuan rawan sosial yang dilatih	Dinas Sosial PPKBP3A	45 orang	40.000.000	APBD		45 orang	100.000.000
16	Program rehabilitasi sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani		100%	240.000.000				319.694.240
10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah pemberian Operasional TAGANA	Dinas Sosial PPKBP3A	30 orang	90.000.000	APBD		30 Orang	155.381.675
11	Bufferstock dan Penanggulangan Bencana	Jenis barang yang dibeli untuk persediaan gudang Bufferstock penanggulangan bencana	Dinas Sosial PPKBP3A	7 macam	60.000.000	APBD		7 macam	69.290.425
12	Penyediaan dapur umum lapangan pasca bencana	jumlah pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat yang terkena bencana	Dinas Sosial PPKBP3A	25 macam	90.000.000	APBD		25 macam	95.022.140
17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	41.300.000			100%	54.000.000
07	Rumah singgah	Jumlah anak jalanan yang dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	20 orang	41.300.000	APBD		20 orang	54.000.000
20	Program pembinaan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, PSKS dan korban penyalahgunaan NAPZA	Dinas Sosial PPKBP3A	60%	101.000.000				224.900.000
03	Pelayanan dan penanganan penyandang penyakit sosial	Jumlah penyandang penyakit sosial yang ditangani	Dinas Sosial PPKBP3A	1 tahun	101.000.000	APBD		1 tahun	224.900.000
21	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	398.000.000				721.280.000
02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesepakatan sosial	jumlah fakir miskin yang memperoleh paket sembako	Dinas Sosial PPKBP3A	57 orang	110.000.000	APBD		125 orang	180.620.000
03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah karang taruna yang dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	16 Karang taruna	30.000.000	APBD		16 Karang taruna	149.490.000
05	Pelayanan kebijakan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah buku database PMKS yang diterbitkan Sosialisasi hasil pendataan PMKS	Dinas sosial PPKBP3A	25 buku 50 orang	60.000.000	APBD		25 buku	54.450.000
06	Optimalisasi data dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah buku data kemiskinan yang diterbitkan Sosialisasi BDT, KKS, Stiker KPM	Dinas sosial PPKBP3A	25 buku 50 orang	50.000.000	APBD		25 buku	140.800.000
21	Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah veteran/janda veteran mengikuti peringatan hari-hari besar nasional	Dinas Sosial PPKBP3A	57 orang	48.000.000	APBD		57 orang	95.920.000
22	Pelaksanaan Bulan Bakti Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang ikut serta	Dinas Sosial PPKBP3A	19 FKT	60.000.000	APBD		19 FKT	60.000.000
23	Pelatihan peningkatan kapasitas PSM dan TKSK	Jumlah PSM dan TKSK yang dilatih	Dinas Sosial PPKBP3A	93 PSM 2TKSK	40.000.000	APBD		93 PSM 2TKSK	40.000.000
1.02.02.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Tingkat capaian kota layak anak	Dinas Sosial PPKBP3A	Madya	365.000.006				698.975.010
05	Fasilitasi pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan	Jumlah peserta pelatihan pengasuhan anak	Dinas Sosial PPKBP3A	30 orang	65.000.000	APBD		30 orang	200.000.000
06	Capacity building forda	Jumlah perwakilan anak yang mengikuti capacity building Forda	Dinas Sosial PPKBP3A	240 orang	180.000.000	APBD		100 orang	328.975.000
		Jumlah peserta pemilihan Duta Anak		35 orang				35 orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Pengembangan kota layak anak	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dinilai	Dinas Sosial PPKBP3A	6 fasilitas	120.000.000			6 fasilitas	170.000.000
		Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA yang dibina		12 sekolah				12 sekolah	
16	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	455.360.000			100%	1.111.452.000
01	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah peserta workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Dinas Sosial PPKBP3A	40 orang pimpinan/ pengambil keputusan organisasi publik	26.000.000	APBD		40 orang pimpinan/ pengambil keputusan organisasi publik	27.590.000
02	Pelaksanaan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah peserta sosialisasi UU KDRT dan perlindungan Anak	Dinas Sosial PPKBP3A	100 orang	127.000.000	APBD		100 orang	242.287.000
		Jumlah relawan kelurahan yang dibina		100 orang				100 orang	
05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah peserta sosialisasi dan workshop PUG	Dinas Sosial PPKBP3A	40 orang	30.000.000	APBD		1 tahun	110.580.000
06	Peningkatan kapasitas anggota TIM penggerak PPRG	Jumlah peserta Bimtek bagi Tim penggerak PPRG dalam percepatan PUG melalui PPRG	Dinas Sosial PPKBP3A	40 orang orang Tim penggerak PPRG kota Padang Panjang	50.000.000	APBD		40 orang orang Tim penggerak PPRG kota Padang Panjang	26.250.000
09	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM dalam penanganan ABH	Dinas Sosial PPKBP3A	100 orang	25.000.000	APBD		100 Orang	26.250.000
10	Pengembangan informasi gender dan anak	Jumlah buku profil perempuan dan anak	Dinas Sosial PPKBP3A	25 buku	60.000.000	APBD		25 buku	85.995.000
11	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Organisasi Masyarakat di Kelurahan	Dinas Sosial PPKBP3A	350 orang	50.000.000	APBD		350 orang	251.250.000
01	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	30 organisasi	87.360.000	APBD		30 organisasi	341.250.000
		Jumlah peserta pelatihan bundo kanduang		14 orang					
17	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	150.150.000			100%	358.496.250
02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT di sekolah	Jumlah peserta pelatihan	Dinas Sosial PPKBP3A	60 orang	65.000.000	APBD		60 orang	263.313.750
08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	jumlah kasus yang ditangani	Dinas Sosial PPKBP3A	60 kasus	85.150.000	APBD		60 kasus	95.182.500
1.02.07.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
15	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	2.214.000.000				3.882.375.000
01	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah peserta Mukerda DPD LPM dan LPM yang dinilai	Dinas Sosial PPKBP3A	55 orang dan 16 kelurahan	152.000.000	APBD		55 orang dan 16 kelurahan	450.000.000
06	Penyelenggaraan peningkatan peranan perempuan pedesaan melalui kegiatan Jambore PKK	Jumlah jambore yang di ikuti	Dinas Sosial PPKBP3A	16 kelurahan	332.000.000	APBD		16 kelurahan	591.900.000
07	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Jumlah peserta sosialisasi, workshop, penyuluhan	Dinas Sosial PPKBP3A	200 orang	750.000.000	APBD		200 orang	1.206.000.000
09	Pendataan keluarga melalui Dasawisma	Jumlah ketua dasawisma yang dinilai tk. Kota dan provinsi	Dinas Sosial PPKBP3A	913 kader	980.000.000	APBD		913 kader	1.634.475.000
17	Program peningkatan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Dinas Sosial PPKBP3A	90%	354.000.000				565.435.050
08	Monitoring dan evaluasi BBGRM	Jumlah kelurahan yang dibina untuk mengikuti BBGRM Tk. Provinsi dan nasional	Dinas Sosial PPKBP3A	1 kelurahan	120.000.000	APBD		1 kelurahan	165.464.750
10	Pemberdayaan masyarakat melalui penilaian kelurahan berprestasi	Jumlah kelurahan yang di nilai	Dinas Sosial PPKBP3A	16 Kelurahan	89.000.000	APBD			200.667.500
09	Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan terhadap teknologi tepat guna	Jumlah pengurus posyantek yang dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	12 orang	100.000.000	APBD		12 orang	122.492.000
01	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah pengurus UP2K yang diberi pelatihan dan dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	30 orang	45.000.000	APBD		30 orang	76.810.800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Program peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat	Persentase lembaga adat yang aktif	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	130.000.000			100%	539.325.000
05	Pelatihan pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai sosial	Jumlah peserta sarasehan KAN Kota Padang Panjang	Dinas Sosial PPKBP3A	175 orang	130.000.000	APBD		175 orang	539.325.000
1.02.08. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
15	Program keluarga berencana	Persentase PUS yang memiliki 2 anak	Dinas Sosial PPKBP3A	32,00%	2.471.470.000			2 orang	3.332.290.000
02	Pelayanan KIE/Teknik motivasi dan konseling Program KB/KS	Cakupan data basis keluarga dan pelayanan informasi program KKBPK	Dinas Sosial PPKBP3A	16 kelurahan	85.000.000	APBD		16 kelurahan	110.000.000
04	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah kader yang dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	525 orang kader	1.000.000.000	APBD		525 orang kader	1.814.820.000
05	Pengembangan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang di kembangkan	Dinas Sosial PPKBP3A	2 Kampung KB	45.000.000	APBD		3 Kampung KB	66.000.000
06	DAK Bidang KB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang diadakan	Dinas Sosial PPKBP3A	3 Paket	935.000.000			3 Paket	935.000.000
07	Dana Bantuan Operasional KB	Jumlah balai penyuluhan yang difasilitasi	Dinas Sosial PPKBP3A	2 balai penyuluhan	406.470.000			2 balai penyuluhan	406.470.000
16	Program kesehatan reproduksi remaja	Cakupan PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Dinas Sosial PPKBP3A	0,3%	320.000.000				564.500.000
03	Pemilihan duta GenRe Jalur pendidikan dan masyarakat	Jumlah finalis yang mengikuti pemilihan Duta GenRe	Dinas Sosial PPKBP3A	20 pasang	125.000.000	APBD		20 pasang	244.500.000
04	Ajang temu kreatifitas PIK Remaja melalui Jambore Saka Kencana	Pengurus PIK Remaja yang mengikuti Jambore	Dinas Sosial PPKBP3A	300 orang	150.000.000	APBD		300 orang	225.000.000
02	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Jumlah kelompok PIK R/M yang dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	16 kelompok	45.000.000	APBD		16 kelompok	95.000.000
17	Program pelayanan kontrasepsi	Jumlah Pelayanan Kontrasepsi yang dilakukan	Dinas Sosial PPKBP3A	4 pelayanan	65.000.000				71.500.000
02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi	Jumlah PUS yang dilayani	Dinas Sosial PPKBP3A	840 PUS	65.000.000	APBD		840 PUS	71.500.000
18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS dan Tribina	Dinas Sosial PPKBP3A	70%	225.000.000				426.960.000
01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat yang peduli KB	Jumlah kelompok peduli KB yang dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	37 kelompok	75.000.000	APBD		38 Kelompok	162.960.000
04	Pemantapan ketahanan keluarga	Jumlah kelompok tribina yang dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	91 kelompok	105.000.000	APBD		92 kelompok	172.800.000
05	pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera	Jumlah Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera yang dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	2 kelompok	45.000.000	APBD		2 kelompok	91.200.000
23	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk	Persentase OPD yang mendapatkan data Grand Desain Kependudukan	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	65.000.000				75.000.000
01	Grand Desain Pengendalian Kependudukan Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Pengendalian Kependudukan	Dinas Sosial PPKBP3A	30 Dokumen	65.000.000	APBD		30 Dokumen	75.000.000
JUMLAH					10.753.990.006				16.849.813.550

PRIORITAS KEDUA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Dinas Sosial PPKBP3A	90%	26.090.000.000	APBD		1 tahun	-
07	Pengadaan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangun	Dinas Sosial PPKBP3A	1 Unit	25.000.000.000	APBD	P2	-	-
07	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Dinas Sosial PPKBP3A	6 unit kendaraan roda 2	150.000.000				
07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Dinas Sosial PPKBP3A	5 unit komputer, 5 unit laptop, 6 unit UPS, 1 unit alat musik organ, 1 unit infocus, 10 unit printer, 1 unit printer besar, 10 buah lemari	750.000.000	APBD	P2	-	-
22	Pengadaan mobileur	Jumlah mobileur yang diadakan	Dinas Sosial PPKBP3A	2 set sofa, 20 buah meja kerja, 20 buah kursi kerja	190.000.000	APBD	P2	-	-
16	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase penyandang disabilitas yang tertangani	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	75.000.000			100%	200.000.000
23	Pembuatan produk hukum disabilitas	Jumlah produk hukum yang dibuat	Dinas Sosial PPKBP3A	1 Naskah akademik	75.000.000	APBD		1 perda	200.000.000
15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Tingkat capaian kota layak anak	Dinas Sosial PPKBP3A	Madya	20.150.000				25.000.000
03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti sosialisasi undang-undang perlindungan anak	Dinas Sosial PPKBP3A	120 orang	20.150.000	APBD		120 orang	25.000.000
16	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Optimalisasi fungsi lembaga pengarusutamaan gender	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	35.000.000			100%	101.325.000
08	Rapat Koordinasi penyampaian Program kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah peserta Rakor	Dinas Sosial PPKBP3A	24 OPD dan Organisasi Mitra Kerja Pemberdayaan perempuan	35.000.000	APBD		24 OPD dan Organisasi Mitra Kerja Pemberdayaan perempuan	101.325.000
17	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	45.000.000			100%	47.250.000
05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Jumlah tenaga kerja perempuan yang di sosialisasi	Dinas Sosial PPKBP3A	135 orang	45.000.000			135 orang	47.250.000
18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase organisasi perempuan yang aktif	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	150.000.000				210.000.000
02	Pelatihan Penguatan Kelompok dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan	pengurus PKK dan Dasawisma di Kota Padang Panjang	Dinas Sosial PPKBP3A	200 orang	150.000.000	APBD		200 orang	210.000.000
15	Program keluarga berencana	Persentase PUS yang memiliki 2 anak	Dinas Sosial PPKBP3A	32,00%	125.000.000			2 orang	174.000.000
03	Temu kreatifitas kader KB/KS dan PLKB/PKB	Jumlah kader yang dinilai dan Jambore yang di ikuti	Dinas Sosial PPKBP3A	30 orang dan 2 Jambore	125.000.000			30 orang	174.000.000
16	Program kesehatan reproduksi remaja	Cakupan PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Dinas Sosial PPKBP3A	0,3%	150.000.000				193.380.000
01	Advokasi dan KIE tentang klesehatan reproduksi remaja (KRR)	Jumlah peserta sosialisasi Program KRR	Dinas Sosial PPKBP3A	120 orang	150.000.000	APBD		120 orang	193.380.000
18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS dan Tribina	Dinas Sosial PPKBP3A	70%	170.000.000				280.500.000
06	Penggerakan kemitraan dalam mengelola kependudukan dan keluarga berencana	Penilaian yang dilaksanakan	Dinas Sosial PPKBP3A	3 penilaian	170.000.000	APBD		3 penilaian	280.500.000
		Jumlah peserta sosialisasi		100 orang				100 orang	
19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Persentase Posyandu yang aktif melaksanakan kegiatan	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	65.000.000	APBD			95.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Fasilitasi bahan penyuluhan dan informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak	Jumlah kelompok yang dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	43 kelompok	65.000.000	APBD		43 kelompok	95.000.000
23	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk	Persentase OPD yang mendapatkan data Grand Desain Kependudukan	Dinas Sosial PPKBP3A	100%	125.000.000				110.000.000
02	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	Dinas Sosial PPKBP3A	30 orang	60.000.000	APBD	P2	30 orang	55.000.000
03	Forum Koalisi Kependudukan	Jumlah Anggota Koalisi yang dibina	Dinas Sosial PPKBP3A	25 orang	65.000.000	APBD		25 orang	55.000.000
JUMLAH					26.900.150.000				1.226.455.000